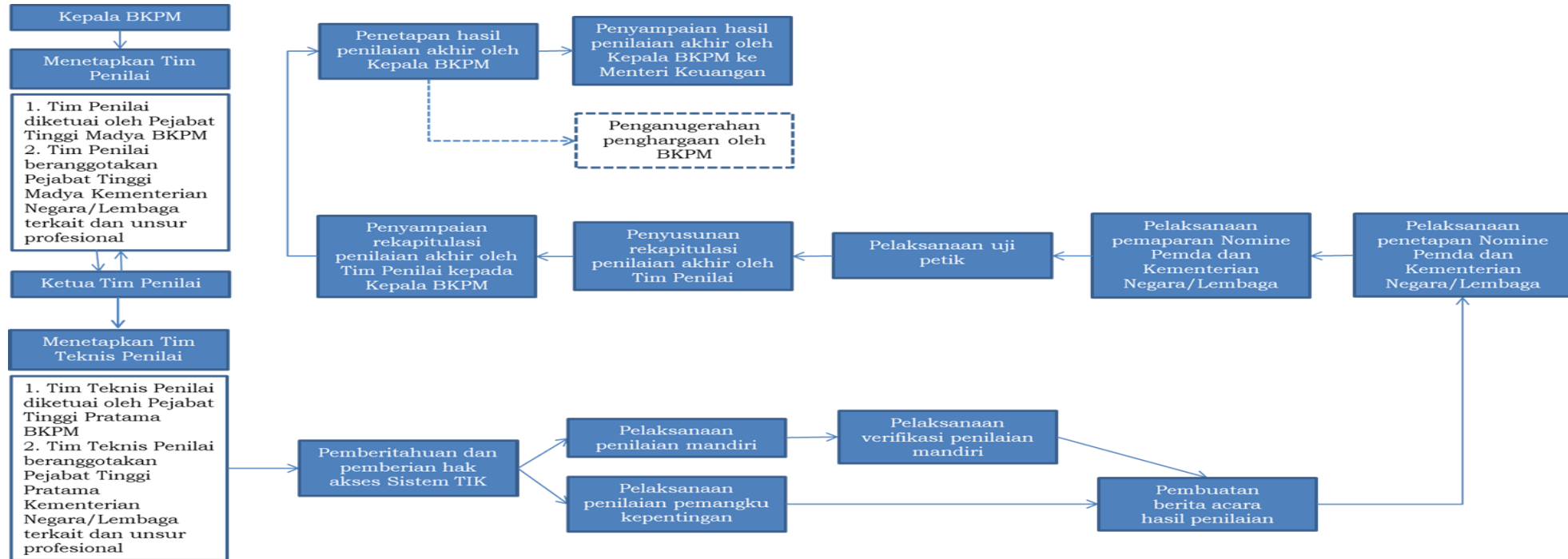


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ALUR TAHAPAN PENILAIAN KINERJA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
SERTA PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEMBOBOTAN KOMPONEN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH
DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kelembagaan	35%	35%
2.	Sumber Daya Manusia	25%	25%
3.	Sarana dan Prasarana Kerja	20%	20%
4.	Capaian Realisasi Proyek Investasi	10%	10%
5.	Inovasi	10%	10%
Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda		100%	100%

II. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	25%	25%

2.	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40%	40%
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online Single Submission</i>	35%	35%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda		100%	100%

III. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	25%	25%
2.	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40%	40%
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online Single Submission</i>	35%	35%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga		100%	100%

IV. Penilaian Kinerja PTSP Pemda oleh Pemangku Kepentingan

No.	Penilaian Kinerja PTSP Pemda	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda	80%	75%
2.	Penilaian Organisasi Pengusaha	20%	15%
3.	Penilaian PTSP Pemda Provinsi terhadap PTSP Pemda Kabupaten/Kota	-	10%
Penilaian Kinerja PTSP Pemda		100%	100%

V. Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Penilaian Kinerja	Pemerintah Daerah	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Penilaian Kinerja PTSP	70%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB	30%	100%
Penilaian Kinerja		100%	100%

VI. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Pemaparan Bagi Nomine

No.	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	60%	60%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB			60%
3.	Penilaian Pemaparan	40%	40%	40%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

VII. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik Bagi Nomine

No.	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	50%	50%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB			50%
3.	Penilaian Uji Petik	50%	50%	50%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK
KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

A. IDENTITAS

Nama daerah	:	
Nomenklatur penyelenggara PTSP	:	
Kesesuaian pada Permendagri Tahun 100 Tahun 2016	Nomor	:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai
			Disesuaikan sejak tahun :
Tahun pembentukan PTSP	:	
Alamat kantor	:	
		Kecamatan :	Kota/Kabupaten :
	
		Provinsi : ...	
		Kode pos : ...	
Titik koordinat kantor (<i>Google Earth</i>)	:	Garis bujur	<input type="text"/>
		Garis lintang	<input type="text"/>
Nomor telepon/faksimili	:	
Situs	:	
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	
Media social	:	1	
		2	
Jumlah SDM	:	Bidang Pelayanan :
		Bidang Dalaks :

Jumlah perizinan berusaha yang dilayani	:
Jumlah aktivitas pendukung perizinan berusaha yang dilayani	:
Nama Kepala Dinas	:
Contact Person	: 1
	2

B. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI

Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)	
1	Kelembagaan	a. Integritas	Menilai ketersediaan SOP untuk aktivitas perizinan berusaha dan aktivitas pendukung perizinan berusaha	<i>Semua ada SOP = 25, Sebagian ada SOP = 10, Tidak ada SOP = 0</i>
		Menilai kepatuhan pada SOP yang ada	<i>Semua SOP dipatuhi = 25, Sebagian SOP dipatuhi = 10, Tidak ada SOP yang dipatuhi = 0</i>	
		Menilai kepatuhan pada NSPK Kementerian/Lembaga	<i>Semua NSPK dipatuhi = 25, Sebagian NSPK dipatuhi = 10, Tidak ada NSPK yang dipatuhi = 0</i>	
		Menilai Ketersediaan SLA (Service Level Agreement)	<i>Ada SLA = 25, Sebagian ada SLA = 10, Tidak ada SLA = 0</i>	
		Ketersediaan pakta integritas	<i>Ada pakta integritas = 25, Sebagian ada = 10, Tidak ada pakta integritas = 0</i>	
	b. Kewenangan	Menilai kesesuaian nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan	<i>Sesuai = 25, Tidak sesuai = 0</i>	
		Menilai jumlah pelimpahan wewenang	<i>Semua = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0</i>	
		Menilai keberadaan Tim Teknis	<i>Tim Teknis ada seluruhnya = 25, Tim Teknis ada sebagian = 10, Tim Teknis tidak ada = 0</i>	

			Menilai pembebasan dari pembebanan retribusi daerah kepada PTSP	Tidak ada retribusi = 25, Ada retribusi = 0.
		c.	Soliditas	Menilai banyaknya masalah yang dapat diselesaikan dibandingkan jumlah masalah yang ada.
			Menilai penyelesaian masalah secara mandiri dibandingkan seluruh masalah yang diselesaikan	Semua masalah selesai = 25, Sebagian masalah selesai = 10, Tidak ada masalah yang selesai = 0.
			Kejelasan waktu penyelesaian masalah	Semua masalah diselesaikan secara mandiri = 25, Sebagian masalah diselesaikan secara mandiri = 10, Tidak ada masalah yang diselesaikan secara mandiri = 0.
		d.	Kesinambungan	Ada kejelasan waktu = 25, Tidak ada kejelasan waktu = 0.
			Menilai SKM dan IKM	SKM sudah dilakukan, IKM di atas 75 = 25, SKM sudah dilakukan, IKM di bawah 75 = 10, SKM belum dilakukan = 0.
			Menilai frekuensi pelaksanaan SKM per tahun	Lebih dari 2 kali = 25, 2 kali = 10, 1 kali = 5, Tidak pernah = 0.
		e.	Tanggungjawab	Menilai ketersediaan mekanisme pengaduan
			Menilai ketersediaan layanan <i>help desk</i>	Ada, daring = 25, Ada, luring = 10, Tidak ada = 0.
			Menilai ketersediaan formulir pengaduan	Ada, daring = 25, Ada, luring = 10, Tidak ada = 0.
2	Sumber daya manusia	a.	Kompetensi penanaman modal	Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Tingkat Dasar BKPM
				>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. Tidak ada = 0.

		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Tingkat Lanjut BKPM	>50% = 25, >25 s/d 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Sektorl BKPM	50% = 25, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
b.	Pengalaman di bidang penanaman modal	Menilai pengalaman SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) dengan masa kerja minimal 2 tahun di PTSP	>50% = 25, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai status kepegawaian SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks)	<i>Semua PNS = 25, Sebagian PNS = 10.</i>
c.	Kompetensi keahlian lainnya	Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki sertifikat bahasa asing	>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki sertifikat diklat lain	>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>

3	Sarana dan prasarana kerja	a.	Sistem pelayanan	Menilai ketersediaan prasarana di ruang-an <i>front office</i> (Loket Penerimaan, Loket Penyerahan, Loket Pembayaran, Ruang Layanan Informasi, Ruang Layanan Pengaduan, Ruang Layanan Konsultasi, Ruang Layanan Berbantuan, Ruang Layanan Mandiri, Ruang Layanan Prioritas)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan prasarana di ruangan <i>Back office</i> (ruang rapat dan ruang pemrosesan izin)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan prasarana di ruangan pendukung (Ruang Tunggu, Toilet, Tempat parkir)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan sarana (Komputer, UPS, Server, Mesin <i>Printer</i> , Mesin <i>Fotocopy</i> , Telephone, mesin antrean, Kotak Saran, Wifi, Mesin (media) Survei Kepuasan Layanan) di ruang-ruang <i>Fornt Office, Back Office</i> dan R. pendukung (tidak semua, seperti di ruang parkir misalnya)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Ketersediaan Mall Pelayanan Publik	<i>Ada = 25, Tidak ada = 0.</i>
				Media informasi	Menilai ketersediaan media informasi, seperti Maklumat Pelayanan Publik, Papan Nama Kantor, Petunjuk

			(Panduan) Layanan, Leaflet/ Brosur Jenis Layanan, Website PTSP	
			Menilai kualitas format (Konvensional/Digital) dari media informasi yang digunakan (Maklumat Pelayanan Publik, Tanda Arah Lokasi (Google Maps Point), Papan Nama Kantor, Petunjuk (Panduan) Layanan, Leaflet/Brosur Jenis Layanan, Website PTSP), media sosial	Digital = 25, Konvensional = 10.
4	Capaian realisasi proyek penanaman modal	a.	Persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal	Menilai persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal tahun sebelumnya >100% = 25, 80% sd 99,9% = 10, 70% sd 79,99% = 5, <79,99% = 0
		b.	Persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja	Menilai persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja tahun sebelumnya >100% = 25, 80% sd 99,9% = 10, 70% sd 79,99% = 5, <79,99% = 0
		c.	Upaya Pemda dalam mendorong kemitraan investasi besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah	Menilai kegiatan dilakukan untuk mendorong kemitraan UMK >100 UMK = 25, >50 sd 100 UMK = 15, >10 sd 50 = 10, >10 = 5, Tidak ada = 0
			Menilai ketersediaan data UMK yang siap bermitra dan yang perlu dibina	Tersedia, dan dimanfaatkan = 25, Tersedia tidak dimanfaatkan = 10, tidak tersedia = 0
			Menilai ketersediaan peraturan untuk memitirakan UMK	Ada peraturan, implementasi baik = 25, Ada peraturan, belum implementasi baik = 10, Tidak ada peraturan = 0
5	Inovasi	a.	Jumlah inovasi	Menilai jumlah inovasi yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir >5 = 25, 3 sd 5 = 10, <3 = 5, Tidak ada = 0.

		b.	Implementasi inovasi	Menilai kontinuitas inovasi yang dilakukan	<i>Dilakukan, terjadwal = 25, Dilakukan, tidak terjadwal = 10, Belum dilakukan = 0.</i>
		c.	Kemanfaatan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha	Menilai banyaknya masyarakat yang mengakses inovasi tersebut/tahun	<i>Ada bukti = 25, Bukti kurang = 10, Tidak ada bukti = 0.</i>
				Menilai penilaian masyarakat terhadap inovasi dilakukan	<i>Ada data, respon baik = 25; Ada data, respon kurang baik = 10; Tidak ada data = 0.</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA UNTUK PENILAIAN KINERJA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA

1	Nama organisasi	:			
2	Alamat kantor	:			
3	Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:			
4	Ketua organisasi	:			
5	Telepon/faksimili	:			
7	Jumlah anggota aktif	:			
8	Kepengurusan	:	a. Ada, aktif	b. Ada, kurang aktif	c. Ada, tidak aktif
9	Program kerja	:	a. Ada, berjalan	b. Ada, kurang berjalan	c. Ada, tidak berjalan
10	Koordinasi dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, rutin	b. Ada, tidak rutin	c. Tidak pernah
11	Kegiatan dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, banyak	d. Ada, sedikit	c. Tidak ada
12	Koordinasi dengan PTSP Pemda terakhir kali (Jika jawaban poin 10 "Ada")	:	a. 1 bulan terakhir	b. 6 bulan terakhir	c. Lebih dari 6 bulan yang lalu

B. LEMBAR PENILAIAN PEMBANDING KINERJA PTSP PEMDA OLEH ORGANISASI PENGUSAHA

No	DIMENSI KINERJA LAYANAN PTSP PEMDA	PENILAIAN (Masing-masing kolom, diisi dengan rentang nilai 1 sd 10)		
		Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
A	<i>TANGIBLE/TAMPILAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kelengkapan sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
2	Kondisi fisik sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
3	Penampilan fisik SDM PTSP Pemda			
B	<i>EMPATHY/EMPATI</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kemudahan menemukan kantor PTSP Pemda melalui papan petunjuk/peta internet (<i>Google Map</i>)			

2	Kemudahan berkomunikasi dengan PTSP Pemda (secara langsung/melalui media komunikasi)			
3	Kejelasan prosedur/tata cara perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kualitas pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
5	Ketersediaan terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
6	Kualitas terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
7	Kepedulian PTSP terhadap kepatuhan perusahaan (LKPM, Pemenuhan Komitmen dan lain sebagainya)			
C	<i>RELIABILITY/KETERANDALAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kompetensi SDM PTSP Pemda			
2	Ketersediaan data dan informasi terkait penanaman modal (tata ruang, peta potensi, dan lain sebagainya)			
3	Akurasi informasi yang disampaikan oleh PTSP Pemda			
4	Fasilitasi rencana investasi oleh PTSP Pemda			
D	<i>RESPONSIVENESS/DAYA TANGGAP</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kecepatan pelayanan perizinan berusaha oleh PTSP Pemda			
2	Kecepatan pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
3	Kesigapan penyelesaian masalah oleh PTSP Pemda			
4	Kesigapan PTSP Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan			
5	Kesigapan PTSP Pemda dalam mengawal proyek investasi besar			
E	<i>ASSURANCE/KEPASTIAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kepastian persyaratan dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
2	Ketepatan waktu dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
3	Kepastian prosedur/tata cara dalam mengurus perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kepastian biaya pelayanan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
F	TOTAL KINERJA	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Secara umum, bagaimana kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan oleh PTSP Pemda?			
2	Secara umum, bagaimana kinerja PTSP Pemda dalam mendukung kemudahan berusaha?			
3	Secara khusus, bagaimana kualitas SDM yang dimiliki PTSP Pemda dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha?			

4	Secara khusus, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda?			
G. PERSEPSI TERHADAP PTSP PEMDA YANG DINILAI DIBANDINGKAN PTSP PEMDA LAINNYA				
Dibandingkan dengan PTSP Pemda lain yang pernah dikunjungi, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Kualitas pelayanan perizinan berusaha PTSP Pemda yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Integritas PTSP Pemda (bebas KKN) yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kualitas kinerja PTSP Pemda yang dinilai, secara umum	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Peran PTSP Pemda dalam peningkatan investasi di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda kepada masyarakat/pelaku usaha di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kemudahan berusaha yang dirasakan pelaku usaha atas kinerja PTSP Pemda	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Saran dan Masukan (Isian)				
1	Dalam hal pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda			
2	Dalam hal SDM PTSP Pemda			
3	Dalam hal sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENILAIAN MANDIRI UNTUK
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB)
 PEMERINTAH DAERAH

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada lengkap =25, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
		b.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
		c.	Evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>

			perizinan berusaha	Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
				Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
		d.	Tindak lanjut evaluasi	Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui pendukung sistem sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
2	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a.	Organisasi dan program kerja	Menilai ketersediaan tim teknis internal	<i>Tersedia dengan SK = 25, Tersedia tanpa SK = 10, Tidak tersedia = 0</i>
				Menilai operasional tim teknis internal	<i>Selama hari kerja = 25, 2-4 hari kerja = 10, 1 hari kerja = 5, Tidak ada = 0</i>
				Menilai kecukupan dan keterwakilan Tim Teknis Internal	<i>Cukup dan ada keterwakilan = 25, Cukup namun kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5</i>
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas =10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. K/L, 2. Pemda lain, 3. PTSP Pemda di wilayahnya, terkait reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai keberadaan kegiatan evaluasi internal	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>

		b.	Identifikasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas identifikasi peraturan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi pelaksanaan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi permasalahan terkait perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
		c.	Inventarisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai keberadaan dokumentasi kegiatan	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai keberadaan dokumentasi identifikasi, evaluasi dan pelaksanaan peraturan perizinan berusaha	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aksesibilitas kegiatan dan laporan kegiatan	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses internal = 10, Tidak dapat diakses = 0</i>		
				Menilai penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi dan inventarisasi	<i>Menggunakan teknologi informasi = 25, Konvensional = 0</i>		
		d.	Deregulasi peraturan perizinan berusaha	Menilai jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan dari daftar identifikasi peraturan perizinan berusaha	<i>Ada rekomendasi pada setiap identifikasi = 25, Ada rekomendasi pada sebagian identifikasi = 10, Tidak ada rekomendasi = 0</i>		
		f.	Debirokratisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas mendorong kemudahan perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas terkait upaya mengurangi waktu/biaya perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pengawasan dalam pelaksanaan perizinan berusaha	<i>Ada dan sistematis = 25, Ada namun tidak sistematis = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada PTSP Pemda	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada Pelaku usaha	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
		3	Koneksi Pemda dengan sistem OSS.	a.	Implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum</i>

				<i>digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
	b.	Implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
			Menilai koneksi sistem pendukung sistem OSS dengan sistem OSS	<i>Integrasi = 25, Koneksi = 10 Tidak ada = 0</i>
	c	Evaluasi implementasi	Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>
			Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BERITA ACARA

**HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN**

Nomor Berita Acara :

Lampiran : 1. Daftar Hadir
2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi, Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan dan Hasil Penilaian lain untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah;
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, di, yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun membuat Berita Acara:

1. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah; dan
2. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah,
tahun

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Pemerintah Daerah untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran Berita Acara I

DAFTAR HADIR

**TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

TAHUN

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
.....

Lampiran Berita Acara 2

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI,
HASIL PENILAIAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN HASIL PENILAIAN
LAIN UNTUK KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH
DAERAH**

TAHUN

**I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil
Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi**

No.	Nama Provinsi	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Organisasi Pengusaha)
.....

**II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil
Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten**

No.	Nama Kabupaten	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
.....

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
.....

Lampiran Berita Acara 3

REKAPITULASI HASIL

**PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN

**I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi**

No.	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

**II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah
Kabupaten**

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

**III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota**

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENILAIAN MANDIRI UNTUK
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB)
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1 Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a. Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada lengkap =25, Tidak ada =0</i>
		Menilai aksesibilitas dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
	b. Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
		Menilai aksesibilitas dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
	c. Evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>

				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
				Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
		d.	Tindak lanjut evaluasi	Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
2	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawasan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a.	Organisasi dan program kerja	Menilai ketersediaan tim teknis internal	<i>Tersedia dengan SK = 25, Tersedia tanpa SK = 10, Tidak tersedia = 0</i>
				Menilai operasional tim teknis internal	<i>Selama hari kerja = 25, 2-4 hari kerja = 10, 1 hari kerja = 5, Tidak ada = 0</i>
				Menilai kecukupan dan keterwakilan Tim Teknis Internal	<i>Cukup dan ada keterwakilan = 25, Cukup namun kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5</i>
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas =10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai keberadaan kegiatan evaluasi internal	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>

		b.	Identifikasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas identifikasi peraturan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi pelaksanaan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi permasalahan terkait perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
		c.	Inventarisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai keberadaan dokumentasi kegiatan	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai keberadaan dokumentasi identifikasi, evaluasi dan pelaksanaan peraturan perizinan berusaha	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aksesibilitas kegiatan dan laporan kegiatan	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses internal = 10, Tidak dapat diakses = 0</i>		
				Menilai penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi dan inventarisasi	<i>Menggunakan teknologi informasi = 25, Konvensional = 0</i>		
		d.	Deregulasi peraturan perizinan berusaha	Menilai jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan dari daftar identifikasi peraturan perizinan berusaha	<i>Ada rekomendasi pada setiap identifikasi = 25, Ada rekomendasi pada sebagian identifikasi = 10, Tidak ada rekomendasi = 0</i>		
		f.	Debirokratisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas mendorong kemudahan perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas terkait upaya mengurangi waktu/biaya perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pengawasan dalam pelaksanaan perizinan berusaha	<i>Ada dan sistematis = 25, Ada namun tidak sistematis = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada PTSP Pemda	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada Pelaku usaha	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
		3	Koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS.	a.	Implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum</i>

				<i>digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
	b.	Implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
			Menilai koneksi sistem pendukung sistem OSS dengan sistem OSS	<i>Integrasi = 25, Koneksi = 10 Tidak ada = 0</i>
	c.	Evaluasi implementasi	Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>
			Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN

Nomor Berita Acara :

Lampiran : 1. Daftar Hadir
2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, di, yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun membuat Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran Berita Acara I

DAFTAR HADIR
TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
.....

Lampiran Berita Acara 2

**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN

I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN PAPARAN
 PEMDA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyajian data dan informasi	a.	Kelengkapan data dan informasi	Menilai substansi pemaparan atas kriteria yang ada dalam Penilaian Mandiri	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
		b.	Kompleksitas data dan informasi	Menilai bukti-bukti dokumen dan aktivitas yang telah dilakukan (arsip konvensional, arsip digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
		c.	Validitas data dan informasi	Menilai kebenaran atas kriteria penilaian mandiri yang dipaparkan dan kebenaran bukti-bukti dokumen dan aktivitas yang telah dilakukan (arsip konvensional, arsip	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Seluruhnya valid (85 sd 100), Sebagian valid (70 sd 84,9), Kurang valid (65 sd 69,9), dan</i>

				digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	<i>Tidak valid (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
2	Pemaparan	a.	Teknik penyampaian paparan	Visualisasi bahan presentasi	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Cara penyampaian pesan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Penggunaan properti (media komunikasi) presentasi	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang bagus (65 sd 69,9), dan Tidak bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Penguasaan materi yang dipresentasikan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat menguasai (85 sd 100), Menguasai (70 sd 84,9), Kurang menguasai (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diberikan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>

		b.	Teknik penyusunan paparan	Menilai kesesuaian dengan <i>template</i> paparan yang sudah ditetapkan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat Sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
3	Waktu paparan	a.	Alokasi waktu	Menilai ketepatan waktu paparan sesuai dengan waktu yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak tepat (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
		b.	Efisiensi waktu	Menilai efisiensi waktu dalam menjawab setiap pertanyaan/ tanggapan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat Efisien (85 sd 100), Efisien (70 sd 84,9), Kurang Efisien (65 sd 69,9), dan Tidak Efisien (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	a.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Tersedia Sangat Baik dan Sangat terorganisir dan Terkoneksi Penuh (85 sd 100), Baik dan Terorganisir (70 sd 84,9), Kurang Baik dan Terorganisir (65 sd 69,9), dan Tidak Baik dan Terorganisir (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
2	Implementasi sistem perizinan berusaha	a.	Kualitas implementasi sistem OSS	Menilai kualitas implementasi penggunaan sistem OSS.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Implementasi Penuh (85 sd 100), Implementasi Sebagian besar (70 sd 84,9), Implementasi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Belum implementasi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>

		b.	Kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai kualitas implementasi sistem untuk mendukung sistem OSS	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sistem terkoneksi penuh dengan OSS (85 sd 100), Sistem terkoneksi Sebagian besar (70 sd 84,9), Sistem terkoneksi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Sistem Belum terkoneksi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
--	--	----	---	---	---

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK PEMDA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kesesuaian data dan dokumen pendukung dengan kondisi faktual di lapangan	a.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Tersedia Sangat Baik dan Sangat terorganisir dan Terkoneksi Penuh (85 sd 100), Baik dan Terorganisir (70 sd 84,9), Kurang Baik dan Terorganisir (65 sd 69,9), dan Tidak Baik dan Terorganisir (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
2	Implementasi tem perizinan berusaha	a.	Kualitas implementasi sistem OSS	Menilai kualitas implementasi penggunaan sistem OSS.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Implementasi Penuh (85 sd 100), Implementasi Sebagian besar (70 sd 84,9), Implementasi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Belum implementasi (menggunakan sistem</i>

					<i>sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai kualitas implementasi sistem untuk mendukung sistem OSS	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sistem terkoneksi penuh dengan OSS (85 sd 100), Sistem terkoneksi Sebagian besar (70 sd 84,9), Sistem terkoneksi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Sistem Belum terkoneksi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA